



KABUPATEN
LUWU TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022

BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah periode tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja ini dibuat selain sebagai amanah peraturan perundang-undangan, juga sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Periode 2021 sampai dengan 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Periode 2021 sampai dengan 2026.

Dengan selesainya Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Renja BKAD) tahun 2022 ini yang akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Semoga Renja BKAD tahun 2022 ini dapat mendorong dan mengarahkan semua Program dan kegiatan mencapai hasil yang baik dan mampu mewujudkan Rencana Strategis BKAD yang telah ditetapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Renjaa ini disampaikan terima kasih atas segala jerih payahnya .

Makassar, 1 Juni 2021
Kepala BKAD Kab. Luwu Timur



Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM
Pangkat: Pembina Tk I
Nip. 19700814 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD	22
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal BKAD	31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKAD	54
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD	55
3.3 Program dan Kegiatan BKAD	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD	62
BAB V PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan entitas yang terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistim perencanaan pembangunan nasional. Sehingga Organisasi perangkat daerah perlu menyusun rencana kerja tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun kedepan.

Dalam rencana kerja tahunan, Organisasi Perangkat daerah menguraikan Rencana Program kegiatan dalam satu tahun anggaran yang memuat uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, Lokasi kegiatan, Pagu Indikatif dan perkiraan maju yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang sejalan dengan penetapan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Tahun 2022 adalah tahun ke dua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Periode Tahun 2021-2026.

Rencana kerja perangkat daerah disusun sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dengan adanya rencana pemekaran kelembagaan pada awal tahun 2022 antara pendapatan dan keuangan menjadi lembaga tersendiri yang sebelumnya memuat sektor pendapatan, maka Program Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2022 menguraikan sektor tata kelola keuangan dan aset daerah sebagaimana uraian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai kelembagaan yang baru.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - c. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - g. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2)
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
 - m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - n. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2)
 - o. Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan Program dan keguatan dalam kurun waktu 1 tahun dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 sebagai landasan operasional unsur pimpinan dan staf dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kerangka sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BKAD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BKAD, rencana Kerja BKAD, keterkaitan antara Renja BKAD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BKAD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BKAD Tahun 2022.

- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD.
 - 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BKAD Tahun lalu (Tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD.
Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BKAD.
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD
Menjelaskan dan menyajikan hasil analisa kinerja pelayanan BKAD serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD
Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKAD
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD.
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD
Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas tucusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.
 - 3.3 Program dan Kegiatan BKAD

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BKAD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahunan sebaiknya menguraikan capaian rencana kerja tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya dan membenahi target kinerja yang tidak tercapai untuk kemudian sebagai perhatian utama dalam pencapaian tahun berikutnya.

Secara umum, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Renja BKAD) dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD, untuk kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2022.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)x100 %
	Belanja Tidak Langsung				46 Pegawai	46 Pegawai	100%	44 Pegawai	44 Pegawai	100%
	Belanja Langsung									
4 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran	98%	98%	98%	98%	100%	98%	98%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	24970	0	2550	2550	100%	2550	5100	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (rekening)	180	4	49	46	94%	48	98	54
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi Keuangan yang terbayarkan (orang)	8	8	0	0	0%	0	8	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pembersih yang terbayarkan (orang)	2	2	2	2	100%	2	4	200
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis/unit peralatan yang diperbaiki (unit)	110	69	80	75	94%	69	213	194
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	39	0	39	39	0%	39	78	100
	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	3	0	3	3	0%	3	6	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis) terpakai (jenis)	8	3	9	9	100%	8	20	100
	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	11900	0	5950	5950	0%	5950	11900	100
	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exampler)	540	60	137	131	96%	120	311	58
	Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)	607	119	167	159	95%	150	428	71
	Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga pendukung/administrasi teknis	Jumlah tenaga upah jasa yang terbayarkan (orang)	15	9	18	17	94%	21	47	313
	Kegiatan Penyediaan Operasional kesekretariatan SKPD	Jumlah jenis bahan Operasional kesekretariatan yang tersedia (jenis)	10	10	0	0	0%	0	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
		Kunjungan kerja dalam daerah	997	228	220	110	50%	275	613	61
		Monitoring dan evaluasi	20	4	4	4	100%	4	12	60
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98%	98%	200%	600%	100%	98%	98%	100%
		Kegiatan Pembangunan Gedung kantor	9	2	2	2	100%	0	4	44
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	14	17	1	1	100%	0	18	129
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	10	5	1	1	100%	5	11	110

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	102	20	65	65	100%	24	109	107
	Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara (gedung)	3	3	3	3	100%	2	8	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	21	17	21	21	100%	23	61	100
	Kegiatan Pembangunan Taman,lapangan/fasilitas parkir	Jumlah taman/fasilitas parkir yang diadakan (paket)	4	1	1	1	100%	1	3	75
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan Pakaian	100%	0	90%	90%	90%	0	95%	95%
	Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian Dinas (pasang)	66	0	0	0	0%	0	0	0
	Kegiatan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian pakaian olahraga (pasang)	66	0	56	56	100%	0	56	85

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti BinteK dan Sosialisasi	100%	0		95%		95%	95%	100%
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan atau diikuti	13	3	3	1	33%	1	5	0
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	500	0	750	450	0%	450	900	2
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti binteK (orang)	365	45	43	31	72%	44	120	33
	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tercapainya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%		95%	95%	100%	95%	95%	100%
	Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan AKIP (dok)	5	1	1	1	100%	1	3	60
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Lapkeu semester I,II dan laporan keuangan akhir tahun (dok)	10	0	3	3	100%	3	6	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase tercapainya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%		95%	95%	100%	95%	95%	100%
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, RK A Perubahan, DPA dan DPPA (dok)	30	6	6	6	100%	6	18	60
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang APBD (dok)	5	1	1	1	100%	1	3	60
	Kegiatan Penyusunan Rancangan perKDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PerKDH tentang penjabaran APBD (dok)	5	1	1	1	100%	1	3	60
	Kegiatan Penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang perubahan APBD (dok)	5	1	1	1	100%	1	3	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
		Kegiatan Penyusunan rancangan per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	1	1	1	100%	1	3	60
		Kegiatan Pengelolaan dokumen pelaksana anggaran surat penyediaan dana	1035	164	282	282	100%	316	762	74
		Kegiatan Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD	328	82	118	119	101%	53	254	77
		Kegiatan penyusunan kebijakan keuangan daerah	16	0	22	22	0%	20	42	263
		Kegiatan peningkatan sistim pengelolaan keuangan daerah	3	0	0	0	0%	1	1	33
		Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1	1	0	0	0%	0	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Regulasi dan Dokumen Laporan aset yang terdata (dok)	5	0	0	0	100%	0	0	0
	Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah regulasi dan Dokumen laporan penerimaan daerah (dok)	12	0	0	0	100%	0	0	0
	Kegiatan Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	Jumlah Objek PBB-P2 yang teridentifikasi (objek pajak)	272260	0	0	0	100%	0	0	0
	Kegiatan Pendistribusian Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Distribusi Aset (dok)	1	0	0	0	100%	0	0	0
	Kegiatan Penghapusan inventaris aset/barang daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset yang diinventaris dan dihapus (dok)	6	1	0	0	0%	0	0	0
	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang direkonsiliasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
		Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5	1	1	1	100%	1	3	60
		Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5	1	1	1	100%	1	3	60
		Kegiatan Penatausahaan keuangan daerah	69035	9887	17188	20790	121%	14500	45177	65
		Penyusunan Neraca dan pembukuan Keuangan Daerah	28	0	14	14	0%	7	21	75
		Program Peningkatan Penerimaan Daerah	86%		86%	86%	100%	86%	86%	100%
		Persentase tcapainya Penerimaan Pendapatan Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Kegiatan Optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdaftar(dok)	35	3	0	0	100%	0	3	9
	Kegiatan Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	Jumlah Objek PBB-P2 yang teridentifikasi (objek pajak)	113250	131883	118468	118450	100%	0	250333	221
	Kegiatan Penyusunan Perda tentang Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perda pendapatan daerah (dok)	2	1	0	0	0%	0	1	50
	Kegiatan Penyusunan Perda tentang penyertaan modal	Jumlah dokumen perda penyertaan modal (dok)	1	0	0	0	0%	0	0	0
	Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah	Cakupan persentase peningkatan pendapatan asli daerah (persen)	95%		0	0	0%	95%	95%	100%
	Pendataan sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata	95		70	74	106%	95	169	178

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan	90		65	65	100%	90	155	172
	Rekonsiliasi laporan pendapatan daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah (dokumen)	24		12	12	100%	12	24	100
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan daerah yang dilakukan pada pengelola PAD	504		252	252	100%	252	504	100
	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan daerah	Cakupan persentase peningkatan pendapatan asli daerah (persen)	97%		0	0	0%	95%	95%	100%
	Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan (PBBP2)	Jumlah objek pajak PBB P2 yang ditetapkan	142661		118468	118450	100%	142661	261111	183

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah	Persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah	97		95	95	100%	97	192	198
	Penyusunan regulasi pendapatan daerah	Jumlah regulasi pendapatan daerah	17		8	9	113%	8	17	100
	Optimalisasi penyelesaian pendapatan daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terselesaikan	85		85	85	100%	85	170	200
	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Barang milik daerah	Persentase tcapainya Pengeloaan dan Pemanfaatan aset daerah	98%		98%	98%	100%	98%	98%	100%
	Kegiatan Penghapusan, pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset daerah yang di manfaatkan atau dihapus 9dok)	5	1	0	0	0%	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
		Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
	Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Aset/barang milik daerah yang diadakan (aplikasi)	1	1	0	0	0%	0	0	0
	Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang ditatausahakan dengan baik	100	5	100	100	100%	0	0	0
	Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah (dok)	15	3	0	0	0%	0	3	20
	Kegiatan Penyusunan Perda tentang barang milik daerah	Jumlah Dokumen Perda (dok)	1	1	0	0	0%	0	1	100
	Program Pengelolaan dBarang milik daerah	Cakupan Persentase BMD yang dikelola dengan baik	90%		0%	0%	0%	85%	85%	100%
	Kegiatan penghapusan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dihapus	90	1	80	80	100%	85	166	184

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (N-2)			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020	
						Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun Berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2020 (%)
					Penatausahaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang ditatausahakan dengan baik	100	1	100	100	100%	100	201	201
					Penyusunan standar harga satuan	Jumlah dokumen standar harga satuan yang disusun	4	1	2	2	100%	2	5	125
					Pemanfaatan, pemeliharaan dan pemeliharaan BMD	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan, dipelihara dan diamankan	93	1	90	90	100%	93	184	198

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik** dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dan sasarannya meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan maka dalam pelaksanaan tugas BKAD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Mengkoordinasikan penyusunan dan tugas pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dari tugas dan fungsi BKAD dimaksud, secara rinci jenis pelayanan yang diberikan meliputi :

1. Melaksanakan proses perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
2. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian pengelolaan Keuangan Daerah secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maupun secara horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah;
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi Keuangan Daerah;
5. Memberikan informasi dan Data potensi Keuangan Daerah;

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output),

hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel
Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase pelaporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	
			Meningkatnya tingkat kemandirian fiskal/keuangan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	
			Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	

2.2.1 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPKD Kabupaten Luwu Timur

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar BPKD Kabupaten Luwu Timur mempunyai arah kebijakan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi:

1. Kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada aturan yang berlaku dalam proses penyusunan maupun pertanggungjawaban APBD;
2. Kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
3. Kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah, dan;
4. Kebijakan pengembangan aparatur.

Tabel
Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja keuangan	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Analisis Kinerja Pelayanan badan yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Indikator Kinerja Sasaran OPD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
2	Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari
3	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	96%	97%	98%	99%	100%

Tabel
Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020

TAHUN	REALISASI
2016	Rp. 1.414.058.832.306,66
2017	Rp. 1.365.172.782.139,53
2018	Rp. 1.466.152.959.823,12
2019	Rp. 1.513.976.802.499,03
2020	Rp. 1.495.670.435.578,65

Sumber Data : Audited BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi pendapatan untuk lima tahun terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, terus mengalami peningkatan dimana tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan selama lima tahun terakhir sebesar 8,16 %

Tabel
Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Tahun 2020

1	Pendapatan	%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	22,01
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	58,54
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,37

1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7,24
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	32,85
1.2	Pendapatan Transfer	70,31
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	72,92
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat	10,98
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16,10
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7,67
1.3.1	Pendapatan Hibah	100
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase proporsi tertinggi dalam Realisasi Pendapatan terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 55,11 Persen pada pos Dana Alokasi Umum sebesar 66,87 persen. sedangkan yang terendah ada pada Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang prosentasenya sebesar 20,66 Persen hanya sedikit lebih kecil dibanding Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,71%.

Tabel
Realisasi Belanja Tahun 2016-2020

TAHUN	REALISASI
2016	Rp.1.374.892.757.226,31
2017	Rp.1.416.274.050.915,24
2018	Rp.1.520.109.440.833,57
2019	Rp.1.520.299.657.280,14
2020	Rp.1.224.717.801.721,05

Sumber Data : Audited BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi belanja untuk lima

tahun terakhir dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, terus mengalami peningkatan dimana tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi belanja selama lima tahun terakhir sebesar 6,41%.

Tabel
Persentase Proporsi Realisasi Belanja
Tahun 2020

2	Belanja	%
2.1.	Belanja Operasi	43,72
2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	62,20
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	3,76
2.1.4	Belanja Hibah	2,34
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,11
2.2	Belanja Modal	19,35
2.2.1	Belanja Modal - Tanah	0,21
2.2.2	Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	20,27
	Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	25,71
	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	53,73
	Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya	0,09
	Belanja Modal - Aset Lainnya	0
2.3	Belanja Tak Terduga	0,11
2.3.1	Belanja Tak Terduga	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase proporsi realisasi belanja terbesar terdapat pada belanja langsung 56,28% sedangkan belanja tidak langsung sebesar 43,72%.

Tabel
Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2016-2020

TAHUN	REALISASI
2016	Rp. 39.166.075.080,35
2017	Rp. (51.101.268.775,71)
2018	Rp. (53.956.481.010,45)
2019	Rp. (6.322.854.781,10)
2020	Rp. (6.303.098.096,05)

Sumber Data : Audited BPK RI

Tabel
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016-2020

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Pembiayaan	116.897.939.275,51	156.064.014.355,86	104.961.418.960,15	47.504.937.949,70	26.201.839.853,65
Pengeluaran Pembiayaan	0,00-	0,00-	3.500.000.000,00	15.000.000.000,00	12.000.000.000
Pembiayaan Netto	116.897.939.275,51	156.064.014.355,86	101.461.418.960,15	32.504.937.949,70	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	156.064.014.355,86	104.962.745.580,15	47.504.937.949,70	26.182.083.168,60	72.907.296.644,25

Sumber Data : Audited BPK RI

Tabel
Persentase Pertumbuhan Surplus/(Defisit), Pembiayaan dan SILPA Tahun 2016-2020

Surplus/(Defisit)	Pembiayaan Netto	SILPA
(46,90%)	(36,22%)	(31,21%)
Total Rata-rata Pertumbuhan : (12,69%)		

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi surplus/(defisit), Pembiayaan Netto dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA). Dalam lima tahun terakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dimana Surplus/(defisit) mengalami pertumbuhan minus 46,90 persen,

Pembiayaan Netto mengalami pertumbuhan 36,22 persen dan SILPA menurun rata-rata Minus 31,21 persen sehingga bisa didapatkan total rata-rata pertumbuhan turun sebesar minus 12,69 persen. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan Daerah selama lima tahun terakhir sangat optimal dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peletakan Defisit dan Pengelolaan Pembiayaan dan SILPA untuk menjaga keseimbangan Primer dalam Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah.

Tabel
Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

TAHUN	OPINI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Opini BPK RI

Dari tabel diatas dapat dilihat Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 Opini atas Laporan Keuangan mendapatkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini membuktikan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipaparkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD yang diamanatkan telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,00%	94,00%	95,00%	97,00%	92,00%	96,00%	97,00%	98,00%	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai posisi yang strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Luwu timur, hal ini dikarenakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana prasarana yang memadai.

Adapun isu - isu terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil melalui pelatihan dan Bimbingan Tekhnis;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana dan Prasarana pendukung melalui pemanfaatan, penambahan dan pemeliharaan saran prasarana yang ada;
3. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah dalam upaya mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan manajemen, Inventaris dan pengawasan Aset-aset milik Daerah khususnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam

rangka peningkatan tertib administrasi barang daerah;

Adapun faktor penghambat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah kabupaten luwu timur adalah :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan;
2. Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Teknologi Manajemen Keuangan yang digunakan;

Faktor-faktor penghambat tersebut tidak begitu berpengaruh dan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran serta pencapaian visi misi Pemerintah Daerah, disebabkan manajemen SDM dan manajemen operational di optimalkan sebaik-baiknya. hal tersebut tergambar pada capaian target indikator kinerja dari tahun ke tahun dengan hasil yang memuaskan.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yang baik dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

- a. Motivasi Pimpinan;
- b. Manajemen Kerja yang baik;
- c. Semangat dan Kedisiplinan Aparatur;
- d. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap aparatur;
- e. Integritas dan Profesionalitas Aparatur;
- f. Kerjasama antar personil;
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja oleh pimpinan;

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan review setiap tahun. Adapun gambaran review terhadap rancangan awal Rencana Kerja pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%')	95,30	58,622,985,310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%')	95,30	42,531,635,829	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	340,000,000	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	161,338,693	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	50,296,465	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-		jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	1	22,270,736	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						SKPD					
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	15,000,000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	2	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	1	11,056,908	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	1	10,000,000	
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10	52,714,584	
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	55,117,498,541	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	40,438,025,444	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	46	54,677,498,541	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	46	39,818,825,686	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah SPJ yang diverifikasi (dokumen)	7000	160.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	7000	137,302,675	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	1	69,139,350	
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	95	32,132,500	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	19	280.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	19	230,805,233	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
						SKP					
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	4	149,820,000	
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase BMD yang Diadministrasi kan sesuai standar (%)	98	24,000,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		Persentase BMD yang Diadministrasi kan sesuai standar (%)	98	12,583,298	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	24.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun		12,583,298	
d	KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100	85,587,654	KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100	85,587,654	
1.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	85,587,654	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	4	85,587,654	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capala n	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capalan	Kebutuhan Dana	
								(dokumen)			
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	484,810,000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	493,120,050	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (stel)	70	44,950,000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai an		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	12	100.000.000	Pendataa n dan Pengolah an Adminstr asi Kepegaw aian		persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (persen)	98	85,587,654	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	450	85.000.000	Sosialisas i Peratura n Perundan g-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti peraturan perundang-undangan (orang)	450	62,772,396	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, workshop, seminar	44	299.180.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	46	299,810,000	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	976,978,425	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	578,170,690	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4	14,978,425	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	10	14,978,425	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	4	2,187,565	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	22	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	25	9,883,500	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan	3	65.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan		Jumlah barang cetak dan/atau	3	43,610,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			yang disediakan			Penggandaan		penggandaan yang disediakan (jenis)			
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (exampler)	132	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exampler)	132	13,920,000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah makan minum tamu yang disediakan (kotak)	6250	90.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	250	54,450,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	250	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	250	439,141,200	
g.	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	97	759,200,000	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	97	190,100,000	
1	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	15	50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	20	28,500,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unt)	5	146,400,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1	494.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan	0	0	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7	15.200.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan (unit)	8	15,200,000	
h	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	506,910,690	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	348,710,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (dokumen)	24	40,910,690	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	6000	40,910,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi dan listrik yang terbayarkan	36	282.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	67	216,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	5	184.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	5	91,800,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	328,000,000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95	224,000,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	19	86,000,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	69	88,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	75	88,000,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	2	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (unit)	1	50,000,000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan	96,70	204,032,352,833	PROGRAM PENGEL		Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan	96,70	324,270,165,383	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	KEUANG N DAERAH		keuangan daerah (Persen)			OLAAN KEUANG AN DAERAH		keuangan daerah (Persen)			
a	KEGIATA N KOORDI ASI DAN PENYUSU NAN RENCANA ANGGARA N DAERAH		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1,427,023,383	KEGIATA N KOORDI NASI DAN PENYUS UNAN RENCAN A ANGGAR AN DAERAH		Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1,487,023,383	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70,458,722	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70,458,722	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	65,586,968	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	65,586,968	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	1	10,000,000	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-		Jumlah dokumen verifikasi DPA	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-		Jumlah dokumen verifikasi DPA	1	19,024,606	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	SKPD		yang diverifikasi			SKPD		yang diverifikasi			
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1	19,024,606	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	555,616,670	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2	555,616,670	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Perda Perubahan dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2	543,361,811	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2	543,361,811	
8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	15	59,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	15	59,600,000	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran	4	94,350,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran	4	94,350,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			belanja daerah					belanja daerah			
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota (laporan)	5	50,000,000	
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Persen)	97	955,500,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Persen)	97	417,023,025	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi (laporan)	36	68,521,650	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah SPD perangkat daerah yang diterbitkan (SPD)	236	20,350,000	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,		Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana	12	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		transfer lainnya (dokumen)			
4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah kerjasama transaksi non tunai yang dilaksanakan dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	4	65,279,275	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		jumlah laporan penatausahaan kas daerah (laporan)	24	67,732,000	
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas		jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran	708	45,140,100	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		OPD yang telah direkonsiliasi (laporan)			
c	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	97	955,500,000	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	97	1,062,646,975	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah SPM yang diverifikasi dan SP2D yang diterbitkan	18.500	221,800,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi (dokumen)	12	79,486,110	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi (dokumen)	224	50,455,740	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan	16	155.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan	18	154,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		semesteran yang disusun			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		semesteran yang disusun (dokumen)			
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	12	99.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	18	99,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan		Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun (dokumen)	2	439,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban		Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun (dokumen)	2	439,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah dokumen LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1	40,200,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP yang tersusun (dokumen)	1	35,358,500	
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditangani (laporan)	2	33,558,500	
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	2	31,218,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah					Daerah		Daerah (dokumen)			
9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi (laporan)	2	140,069,625	
d	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (Persen)	95	201,649,829,450	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (Persen)	95	321,202,982,000	
1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah					Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen investasi yang dihasilkan (dokumen)	4	29,373,275	
2	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah (dokumen)	2	23,779,275	
3	Analisis Perencanaan dan		Jumlah belanja transfer ke desa	127	195,149,829,450	Analisis Perencanaan dan		Jumlah belanja transfer ke desa (desa)	125	319,149,829,450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah					Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah					
4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah kejadian yang tidak terduga	1	6.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola (dokumen)	3	2,000,000,000	
e	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (dokumen)			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (dokumen)	2	100,490,000	
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		jumlah sistem yang diupgrade (laporan)	3	100,490,000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat	58	593,600,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat	58	731,718,438	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Daerah)					Daerah)			
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	90	593,600,000	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	90	731,718,438	
1	Penyusunan Standar Harga		Jumlah dokumen standar harga disusun	2	41,200,000	Penyusunan Standar Harga		Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (dokumen)	2	35,300,035	
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen SBMD dan SKBMD yang tersusun (dokumen)	64	30,411,500	
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah (dokumen)	2	30,816,400	
4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan berita acara pengelolaan barang milik daerah yang dibuat (laporan)	1	35,715,003	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik	2	189,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang	2	90,962,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			daerah yang dilakukan					disusun (dokumen)			
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	2	60,200,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun (dokumen)	3	31,973,000	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBMD	2	111,100,000	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan (laporan)	20	45,503,000	
8	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun	2	85,100,000	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun (dokumen)	2	75,000,000	
9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian (dokumen)	4	34,737,500	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik		Persentase nilai BMD yang dihapus	90	106,500,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan		Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan,	2	45,653,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Daerah					Barang Milik Daerah		dan penghapusan BMD yang optimal (dokumen)			
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan (laporan)	1	30,453,000	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	1	30,983,500	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota (laporan)	2	214,210,000	
	Jumlah				266,468,038,143	Jumlah				367,533,519,650	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan penyusunan RENJA Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2022 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musernbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan **arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022** adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Adapun Prioritas nasional dalam mendukung arah kebijakan pembangunan tahun 2022 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemertaan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Selanjutnya tugas Badan ini adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah ;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan ;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Prioritas Nasional yang terkait dengan tugas dan Fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah adalah Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu kepada Misi 4 yakni terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan arah kebijakan terciptanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, sebagai berikut:

No	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Keuangan
3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

4 KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

5.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

6 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.6 Fasilitas Kunjungan Tamu

6.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7 KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

7.1 Pengadaan Mebel

7.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

9.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

9.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
DAERAH

1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD

1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

1.11 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2 KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

- 2.1 Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 2.3 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer
- 2.4 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga Keuangan Bank dan lembaga Keuangan bukan Bank
- 2.5 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran kas daerah, Laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan Pemungutan/pemotongan dan Penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)
- 2.6 Rekonsiliasi Data Ta Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait

3 KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban
- 3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 3.6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- 3.7 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- 3.8 Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akluntansi pemerintah daerah
- 3.9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota

4 KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 4.1 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
- 4.2 Analisis Perencanaa dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
- 4.3 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 4.4 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

5 KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN IMPELMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH

- 5.1 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota

No PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 1.1 Penyusunan Standar Harga
- 1.2 Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 1.6 Inventarisasi Barang Milik Daerah

- 1.7 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 1.8 Penilaian Barang Milik Daerah
- 1.9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 1.11 Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 4 program, 14 kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 251.924.990.811,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		41.057.959.168	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.039.354	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	55.966.740	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.014.983	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.259.525	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	55.798.106	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			APBD
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang	37.959.098.859	APBD
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	95%	137.289.425	APBD
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 dokumen	69.097.535	APBD
4)	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	33.036.454	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Dokumen	230.803.902	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		16.783.298	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	16.783.298	APBD
d	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		85.587.090	APBD
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	85.587.090	APBD
e	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		456.128.256	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	74.513.660	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	225 orang	62.804.596	APBD
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	58 orang	318.810.000	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah		786.550.690	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	14.978.425	APBD
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 Unit	2.187.565	APBD
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Jenis	9.883.500	APBD
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	48.000.000	APBD
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	132 exp	13.920.000	APBD
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1300 Orang	54.450.000	APBD
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 kali	643.131.200	APBD
g	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		609.250.000	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Daerah			
1)	Pengadaan Mebel	18 unit	49.000.000	APBD
2)	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 Unit	300.900.000	APBD
3)	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Paket	200.000.000	APBD
4)	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit	59.350.000	APBD
h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		325.484.305	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6000 surat	80.684.305	APBD
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 rekening	204.000.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 orang	40.800.000	APBD
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	17 unit	48.120.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	66 unit	62.690.000	APBD
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	120.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		325.810.829.038	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.487.005.473	
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1 Dokumen	83.877.508	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	78.785.540	APBD
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	57 Dokumen	19.776.600	APBD
4)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi	57 Dokumen	19.024.606	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	Perubahan DPA-SKPD			
5)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	519.221.420	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	54.361.811	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	42 Dokumen	74.161.602	APBD
8)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Laporan	109.547.208	APBD
9)	Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	4 dokumen	20.224.572	APBD
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		426.219.546	
1)	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	36 dokumen	70.179.920	APBD
2)	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	236 dokumen	19.035.000	APBD
3)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	146.200.932	APBD
4)	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank	4 dokumen	59.399.395	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	4 dokumen2	71.341.301	APBD
6)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan	24 dokumen	60.062.998	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	instansi terkait			
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1.044.195.965	
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	77.193.590	APBD
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	12 Dokumen	40.768.055	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	18 Dokumen	169.275.295	APBD
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	12 Dokumen	114.729.725	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	435.731.580	APBD
6)	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	33.045.105	APBD
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2 dokumen	33.208.525	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan petanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	4 kali	140.172.090	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1)	Analisis investasi Pemerintah daerah	1 dokumen	48.978.089	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
2)	Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	4 dokumen	54.112.075	APBD
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	124 desa	319.149.829.450	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	3 Dokumen	3.500.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		664.731.444	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah		664.731.444	
1)	penyusunan standar harga	2 Dokumen	35.298.280	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30793.015	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	2 Dokumen	90.468.876	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	2 Dokumen	31.953.120	APBD
5)	pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	45.456.380	APBD
6)	penilaian barang milik daerah	2 Dokumen	74.995.298	APBD
7)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	32.728.000	APBD
8)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	2 Dokumen	45.652.410	APBD
9)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	30.223.975	APBD
10)	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 dokumen	30.959.450	APBD
11)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 kali	214.202.640	APBD
	JUMLAH		370.890.715.849	

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan Penjabaran dalam Mewujudkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan tahunan. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pengelolaan Keuangan serta Urusan Pengelolaan Aset Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2022 dengan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dan membenahi yang masih kurang.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan

Mallu, Juli 2021
Kepala BPKD
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

DR. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pkt. Pembina Tk I
Nip : 19700814 200212 1 006